

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory dijadikan sebagai *Grand Theory* pada penelitian ini. Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Gudono, 2017). Hubungan teori ini dengan penelitian adalah dimana terjadi kesepakatan yang terjalin antara BPSDMI selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya manusia industri dan rakyat selaku *principal* berdasarkan kepercayaan sesuai tujuan organisasi.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. BPSDMI akan berusaha maksimal dalam mewujudkan sumber daya manusia industry yang mampu bersaing sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini BPSDMI akan melakukan fungsinya sebaik mungkin dalam penganggaran dan pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1. Pengertian Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) menyatakan:

“Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan selama pembentukan modal yang meliputi penambahan aktiva tetap atau persediaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran biaya pemeliharaan untuk memelihara atau meningkatkan masa manfaat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.”

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim, et al., 2018 p. 73). Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2013). Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Mursyidi, 2013 p. 305).

Pada dasarnya pengalokasian anggaran untuk belanja modal dimaksudkan untuk membeli atau menambah aset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan

membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang diperoleh sebagai hasil terealisasinya belanja modal tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana publik, baik untuk kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk menambah fasilitas publik. Biasanya tiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara keuangan.

Berdasarkan uraian di atas belanja modal merupakan bentuk pengeluaran yang dianggarkan guna memperoleh atau menambah asset yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP 71/2010; PP 58/2005; Halim, 2018; Nordiawan; 2013; Mursyidi 2013).

2.1.2.2. Dimensi dan Indikator Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan Belanja Modal ke dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau

penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Dari jenis-jenis belanja modal diatas, maka dimensi dari belanja modal dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk belanja modal adalah jumlah realisasi belanja modal pada BPSDMI Tahun Anggaran 2019-2021.

2.1.3 Belanja Pemeliharaan

2.1.3.1. Pengertian Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan suatu kewajiban yang timbul akibat pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada sehingga tetap dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar atau kecilnya aset tersebut (Halim, et al., 2018 p. 73).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan menyatakan Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Peraturan Menteri Keuangan No 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009 menyatakan bahwa:

“Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lainlain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.”

Belanja pemeliharaan merupakan belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja atau pemerintah daerah yang memiliki aset, sehingga

penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pada praktiknya, pemerintah daerah tidak selalu mengalokasikan dana pemeliharaan sesuai aset tetap. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBD, banyak pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan nilai aset tetap sebagai dasar penentuan biaya pemeliharaan. Bahkan pemerintah daerah tidak memiliki neraca awal sebagai dasar pengalokasian dana pemeliharaan. Belanja pemeliharaan bersifat rutin dan tidak tergantung pada tugas dan fungsi pada satuan kerja unit organisasi, sehingga dapat terjadi pada semua unit organisasi pemerintah dikarenakan semuanya memiliki aset tetap.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan jika belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembelian aset tetap yang sengaja dialokasikan untuk menjaga aset agar selalu siap dipergunakan sesuai dengan kondisi ekonomis (Halim,2018; KSAP, 2006; Permenkeu, 105/2008).

2.1.3.2. Dimensi dan Indikator Belanja Pemeliharaan

Peruntukan belanja pemeliharaan aset pemerintah dapat dilihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagai berikut:

- “1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, yakni digunakan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% dan pemeliharaan halaman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal.

2. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, yakni digunakan untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah jabatan, asrama, aula yang dipisah dengan gedung kantor, gedung museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
3. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, yakni digunakan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
4. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina, yakni digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non Alutsista Kementerian Pertahanan dan TNI.
5. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yakni pengeluaran lainnya untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
6. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, yakni digunakan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal.
7. Belanja pemeliharaan irigasi, yakni digunakan untuk mencatat pemeliharaan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal.
8. Belanja pemeliharaan jaringan, yakni digunakan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal.
9. Belanja pemeliharaan lainnya, yakni digunakan untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.”

Anggaran pemeliharaan dihitung berdasarkan umur atau masa manfaat aset tetap, seperti halnya saat menghitung beban penyusutan aset tetap (Halim, et al., 2018 p. 73). Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun. Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga

dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Berdasarkan pernyataan di atas, dimensi pada belanja pemeliharaan adalah segala jenis peruntukan belanja pemeliharaan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun, atau segala bentuk belanja yang dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan setiap aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk belanja pemeliharaan adalah jumlah realisasi belanja pemeliharaan pada BPSDMI Tahun Anggaran 2019-2021.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science Vol 1 (10), July 2022 Page 1245-1259	Melda Novri Andini, Kiagus Zainal Arifin, Nurhasanah (2022)	<i>The Effect Of Fixed Assets Value, Regional Original Income And Capital Expenditures On Maintenance Expenditures In The District/City Of South Sumatra Province</i>	Secara parsial Nilai Aktiva Tetap, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan. Secara simultan Nilai Aktiva Tetap, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan.

No	Sumber	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Humanis vol 2 No 1 Desember 2021 Page 10-16	Wiwin Adhi Tama, Rini Yuliasari, Wiwik Susilowati, dan Sitti Rafinah (2021)	<i>Analysis the Effect of Realized Capital Expenditure, Fixed Assets Book Value and Realized Maintenance Expenditure on Maintenance Budget of Work Units within the BPK RI</i>	Nilai buku aset tetap dan realisasi belanja pemeliharaan secara parsial berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan, sedangkan realisasi belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan. Pengujian secara simultan realisasi belanja modal, nilai buku aktiva tetap dan realisasi belanja pemeliharaan berpengaruh signifikan terhadap anggaran pemeliharaan.
3	Jurnal Neraca Universitas Audi Indonesia Vol 1 No 1 April 2021	Fredy Kurniawan (2021)	Analisis Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara belanja modal TA 2019 dan belanja pemeliharaan TA berikutnya 2020. Yang berarti bahwa keputusan pemerintah daerah untuk menaikkan jumlah anggaran belanja modal telah dibarengi dengan peningkatan jumlah alokasi dana untuk belanja pemeliharaan.
4	Journal of Islamic Accounting and Finance Al-Muhasib Vol 1 No 1 (2021) Hal 88-108	Nailatur Rohmah, Oktavima Wisdaningrum, M.Iswahyud (2021)	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan Serta Belanja Barang dan Jasa Terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa	Belanja modal berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran, belanja pemeliharaan dan belanja barang-jasa tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran, sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa belanja modal, belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran.

No	Sumber	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019	Harini Wahyuningrum, Budi Kaliwanto (2019)	Analisis Korelasi Antara Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan Batan Tahun 2015-2019	Tidak ada hubungan secara signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan, dengan kata lain pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan belum memperhatikan perolehan asset tetap dari belanja modal tahun sebelumnya.
6	Jurnal Simki Economic Vol 3 No 2 Tahun 2019	Setya Ramadani (2019)	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri (studi pada pemerintah kota kediri Th 2012-2016)	Hasil penelitian ini secara parsial belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan belanja modal dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan.
7	Biram Samtani Sains Vol 2 No 2 (2019)	Adnan, Hasiun Budi (2019)	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Belanja modal dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan secara parsial & simultan. Belanja Modal memiliki pengaruh lebih besar terhadap belanja pemeliharaan, sementara PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja pemeliharaan pemerintah kab/kota di Provinsi Aceh.
8	Jurnal BPPK Vol 12 N0 2 Tahun 2019	Dio Koes Brillianto, Rahadi Nugroho (2019)	Pengaruh Nilai Aset Tetap Dan Belanja Modal Dalam Alokasi Belanja Pemeliharaan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan	Nilai aset tetap dipertimbangkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan sedangkan belanja barang modal tidak.
9	Jurnal Universitas Negeri Semarang November 2014 Hal 553-561	Imroatus Sholikhah (2014)	Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa	Belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DBH, luas wilayah daerah, namun DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal

No	Sumber	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Widya Warta No 02 Tahun XXXVI / Juli 2012	Sri Rustiyaningsih (2012)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur)	Belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan pada tahun yang sama, namun Belanja modal tidak berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan dengan menggunakan tahun yang berbeda. Kenaikan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kenaikan belanja pemeliharaan.
11	JMK Vol 7 No 3 Maret 2009	Baihaqi, Husnul Khotimah (2009)	Hubungan Belanja Modal Dengan Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	Terdapat korelasi antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan.
12	Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No 2 November 2006 Hal 17-32	Syukriy Abdullah, Abdul Halim (2006)	Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan BELanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan	Belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan dan hubungan asosiatif antara belanja modal dan pemeliharaan adalah <i>robust</i> (kuat).

2.2 Kerangka Pemikiran

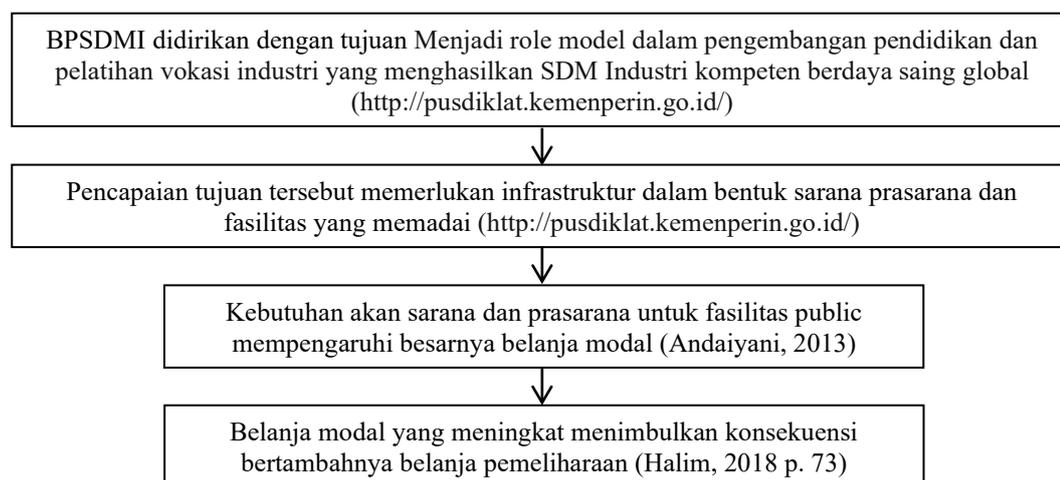
Stewardship Theory menjelaskan jika manajemen dalam menjalankan tugasnya tidak akan termotivasi oleh tujuan individu namun lebih mengutamakan pada sasaran hasil untuk kepentingan organisasi. BPSDMI sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan menjadi *role model* dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi industri yang menghasilkan SDM Industri kompeten berdaya saing global. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana ataupun infrastruktur yang mampu menopang hal tersebut.

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi suatu organisasi. Untuk memperoleh infrastruktur yang baik diperlukan perencanaan penganggaran yang memadai yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional organisasi. Penganggaran untuk infrastruktur masuk ke dalam penganggaran belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta menimbulkan konsekuensi bertambahnya belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Halim, et al., 2018 p. 73)

Secara umum, penggunaan anggaran belanja modal oleh sebuah instansi akan berdampak pada penambahan nilai aset tetap yang dimiliki oleh instansi tersebut. Bertambahnya nilai aset tetap yang dimiliki, maka sudah sewajarnya instansi tersebut akan mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang kinerja. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, alokasi belanja modal erat kaitannya dengan perencanaan keuangan jangka panjang terutama pembiayaan untuk memelihara aset modal yang timbul dari belanja modal tersebut. Konsep kerangka pengeluaran multi-jangka menunjukkan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhitungkan kegunaan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah (kapasitas keuangan) untuk mengelola aset jangka panjang (Halim, et al., 2018 p. 73). Hal ini berarti bahwa bila suatu daerah berencana untuk menganggarkan belanja modal pada anggaran belanjanya, pemerintah tersebut juga harus punya komitmen untuk menyediakan dana untuk anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi atas aset tetap yang diperolehnya dari belanja modal tersebut.

Nilai aset tetap yang dipelihara memiliki andil dalam pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan. Alokasi anggaran belanja pemeliharaan bertambah akibat pertambahan nilai aset sebagai konsekuensi pelaksanaan belanja modal dan dapat berkurang karena mengalami kerusakan, hilang, atau dipindahtangankan, dijual, dihibahkan, ditransfer (Pengaruh Nilai Aset Tetap dan Belanja Modal dalam Alokasi Belanja Pemeliharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2019).

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan ke dalam bagan berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016 p. 93). Berdasarkan uraian di atas penulis menarik suatu hipotesis penelitian adalah Belanja modal berpengaruh positif terhadap Belanja Pemeliharaan.